

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada tiga periode kepemimpinan yang dijalankan oleh Bayu Setyo Nugroho, terutama dalam kebijakan distribusi anggaran dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Dermaji masih belum signifikan. Hal ini, karena kebijakan distribusi tersebut selalu terfokus di Dusun 1, tempat di mana Bayu Setyo Nugroho berasal. Hal ini, dapat dilihat dari beberapa instrument upaya pengentasan kemiskinan, yakni aspek infrastruktur, aspek pendidikan dan aspek ekonomi, pada kenyataannya selalu berpihak kepada Dusun 1. Pembangunan jalan desa yang dapat mendukung distribusi hasil pertanian dan sektor ekonomi lainnya, misalnya, sebagian besar memadai dan layak berada di Dusun 1. Sehingga, para petani dan buruh tani yang menjadi mayoritas pekerjaan Desa Dermaji belum terdampak signifikan. Sementara itu, petani dan buruh tani identik dengan kemiskinan.

Pada upaya meningkatkan taraf pendidikan warganya, Bayu Setyo Nugroho juga berpihak pada Dusun 1. Hal ini, dapat dilihat dari hanya terdapat tiga sarana prasarana pendidikan di Dusun 2 dari 14 yang ada di desa. Jumlah itu pun hanya berupa PAUD yang perannya belum secara signifikan dalam menaikkan taraf ekonomi warganya. Sedangkan, mayoritas warganya hingga saat ini masih merupakan lulusan SD dan sederajat. Oleh karena itu, selain petani dan buruh tani yang menjadi pekerjaan mayoritas lebih dari 23 persen warganya belum memiliki pekerjaan. Hal ini, karena mereka tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja. Terlebih jika persaingan tersebut membutuhkan syarat administrasi berupa

ijazah. Selain itu, upaya warganya untuk dapat mandiri menyelenggarakan perekonomiannya juga belum cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dengan letak BUMDes yang menjadi salah satu tempat transaksi jual-beli di desa, juga terletak di Dusun 1.

Jika dilihat dari upaya yang telah dilakukan Bayu Setyo Nugroho adalah konsekuensi logis dalam kontestasi politik. Dalam hal ini, Bayu Setyo Nugroho, selain sebagai kepala desa, juga merupakan kandidat yang ingin mempertahankan kekuasaannya (keuntungan kepetahanaan). Terutama untuk merawat para massa loyalisnya yang berada di Dusun 1. Selain itu, ketika pada periode ketiga kontestasinya mendapat lawan dari Dusun 2, yakni bernama Iqbal, Bayu Setyo Nugroho juga secara terang-terangan memainkan praktik politik gentong babi menjelang pilkades. Hal ini, dilakukan mengingat Iqbal dapat menjadi lawan kuat Bayu Setyo Nugroho. Oleh karena itu, pada akhir perhitungan suara, keduanya memperoleh suara yang cukup kompetitif, yakni hanya terpaut 100 suara. Berbeda dengan kandidasi sebelumnya yang menang di atas kertas bahkan sempat tidak memiliki lawan. Oleh karena itu, term politik anggaran dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai konteks jangka pendek untuk menguntungkan berbagai kalangan politik yang terkait saja, terutama dalam arena kontestasi.

6.2 Saran

Penelitian tentang politik anggaran memang selalu diminati hal ini karena kajiannya yang kompleks yang dinamis. Hal ini, karena kajian politik anggaran melihat seseorang sebagai pihak yang tidak dilepaskan dari sistem politik. Sehingga,

memahami politik anggaran seringkali cenderung memahami seseorang yang menjadi otoritas dalam sistem politik tersebut. Baik dilihat dari kepentingan ekonomi politiknya, seberapa kuat pengaruh figurnya, kenapa seseorang tersebut mendistribusikan anggaran kepada wilayah, individu maupun kelompok tertentu, dan sebagainya. Namun, seringkali pada pengkaji politik anggaran juga sering terjebak dalam kajian hasilnya justru terlalu administratif, sehingga seseorang sebagai *zoon politicon* samar terlihat. Selain itu, kajian politik anggaran, utamanya di Indonesia, selalu fokus pada lokus-lokus yang lebih besar, sehingga desa acapkali ditinggalkan. Oleh karena itu, harapannya penelitian ini mampu menjadi pemicu bagi penelitian-penelitian yang mengambil lokus pedesaan. Melihat peran desa belakangan yang semakin strategis dalam peran pembangunan nasional.

